

Peranan Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Sri Harti Puspita Dewi
shpusthadewi@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Abd. Majid
Abd.majid@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Muhammad Rayes Ibrahim
Rayes_ibrahim@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Peranan Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; 1) Tata kelola humas sebagai penunjang program izin mendirikan bangunan pada dinas penataan ruang kota makassar; 2) Peranan humas sebagai penunjang program izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) bahwa Tata kelola humas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di kelola oleh bidang SubBagian Umum dan dan sekretaris melalui situs website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

2) Peranan humas Sebagai penunjang program izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, bahwa peranan humas sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Humas Dinas Penatan Ruang Kota Makaasar menjalankan keempat kategori peran sesuai konsep Dozier & Broom, yaitu sebagai penasehat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process facilitator*), dan teknisi komunikasi (*communication technician*).

Kata Kunci: Peranan humas, Izin mendirikan bangunan (IMB)

Abstrak : This study discusses the Role of Public Relations as a Support for the Building Permit Program (IMB) at the Makassar City Spatial Planning Office. This study aims to describe; 1) Public relations governance as a support for the building permit program at the Makassar City Spatial Planning Office; 2) The role of public relations as a support for the building permit (IMB) program at the Makassar City Spatial Planning Office. This study used qualitative description. Data was collected by interview, observation, and documentation methods. The results of the study showed: 1) that the public relations governance of the Makassar City Spatial Planning Office is managed by the General

Subdivision and the secretary through the PPID (Information and Documentation Management Officer) website. 2) The role of public relations As a supporter of the building permit (IMB) program at the Makassar City Spatial Planning Office, the role of public relations plays an important role in conveying information about building permit (IMB) services. Public Relations of the Makassar City Spatial Planning Office carries out four categories of roles according to the Dozier & Broom concept, namely as expert prescriber, communication facilitator, problem-solving process facilitator, and communication technician.

Keywords: *The role of public relations, building permit (IMB)*

PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintah merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diimplementasikan oleh entitas pemerintahan untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan peranannya, komunikasi pemerintah memiliki beberapa tujuan krusial. Pertama, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan keputusan pemerintah menjadi fokus utama, dengan penekanan pada kejelasan, akurasi, dan kemudahan pemahaman. Selanjutnya, komunikasi pemerintah juga bertujuan untuk membentuk citra positif di mata publik dengan menyoroti pencapaian dan integritas pemerintah.

Hubungan masyarakat (Humas) atau yang biasa disebut *Public Relations* (PR), menjadi hal yang tidak asing di setiap lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan maupun lembaga perusahaan. Humas memiliki peranan penting dalam setiap lembaga karena humas menjadi salah satu strategi dalam membentuk citra perusahaan, baik itu citra positif maupun citra negatif. Keberadaan humas dalam sebuah lembaga atau instansi dapat menjadi jembatan penghubung antara lembaga tersebut dan publiknya

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan 5K dan persyaratan teknis yang berlaku kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan menyatakan objek Penertiban bangunan meliputi bangunan yang didirikan tidak didasari dengan IMB dan bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB, Subjek Penertiban Bangunan adalah setiap orang, Badan sebagai pemilik, Pengguna atau kuasa di atas bangunan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan mendirikan bangunan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang saat ini diubah menjadi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan meliputi pemeriksaan Legalitas IMB, Kesesuaian IMB, Peninjauan Lokasi Dan Pengecekan Informasi atas pengaduan masyarakat. Dalam aktivitasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai IMB, pemerintah mengandalkan peran humas pemerintah.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan berisicara penulis atau calon peneliti melalui peneltian dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan maret 2024. Lokasi Penelitian ini bertempat di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, di JL. Urip Sumuharjo No. 8, Karuwisi Utara, Makassar, Maccini, Kec. Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Suryadi, ST., M.Si	1
2.	Nur Halik. H. S.Pd	1
3.	Dr. Ir. H. Muh. Fuad Aziz D.M., S.T. M.Si	1
4.	Hermin, ST	1
5.	Imam taufik. B, SE	1
Total		5

Jenis dan Sumber Data

1. Wawancara
Pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan cara tanya jawab yang dikerjakandengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
2. Observasi Partisipasif
Pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsungdi lapangan atau lokasi penelitian. Observasi akan mencakup proses pelayanan, interaksi dengan masyarakat dan komunikasi yang dilakukan
3. Dokumentasi
Dokumentasi yang dapat di peroleh peneliti dengan cara berbentuk dokumen arsip, jurnal, gambar- gambar berhubungan dengan objek peneltian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data penulis tidak perlu mengartikannya sebagai

kuantifikasi.

2. Penyajian Data

Suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi tersebut disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti selama satu bulan, terhitung sejak februari hingga maret dengan jumlah informan 5 orang menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi langsung serta melakukan wawancara terhadap informan. Berikut hasil yang diperoleh peneliti dari para informan.

1. Tata Kelola Humas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Dalam Menunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sesuai dengan judul penelitian ini dimaksud agar dapat memberikan gambaran mengenai Peranan Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, dengan menggunakan media sebagai sasaran penyebaran informasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui informasi terkait pelayanan yang ada di kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Dari beberapa ahli telah berupaya untuk menggambarkan suatu kompleksitas proses komunikasi kedalam beberapa bentuk untuk komunikasi yang tergantung bagaimana kita dalam memahami dan mendefinisikan proses suatu komunikasi serta bagaimana model suatu komunikasi dapat di aplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Adapun model komunikasi yang paling sering dijadikan sebagai rujukan untuk menggambarkan kompleksitas komunikasi dengan cara lebih sederhana yaitu model komunikasi dari Harold D.Lasswell.

Dalam hal ini Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dapat di artikan sebagai (Siapa), kemudian berusaha mengoutput beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar (Apa). Selanjutnya isi dari komunikasi yang di publis melalui suatu media (Saluran), kepada publik atau masyarakat (Kepada siapa), serta pengaruh yang terjadi di masyarakat atau publik yang mendapat suatu pesan terhadap kondisi dari masyarakat (Efek).

Praktik komunikasi Humas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dapat disingkat sebagai berikut; Bidang sekretariat (Siapa), membahas mengenai kegiatan-kegiatan serta informasi yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, melalui saluran media cetak maupun online (saluran). Kepada publik/masyarakat (Kepada Siapa), dan mengharapkan efek mengetahui lebih dalam mengenai informasi dan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar (Efek).

Didalam komunikasi Harold D.Lasswell di pandang sebagai suatu proses yang berjalan dengan cara satu arah one way communication, dimana sender atau pengirim pesan adalah salah-satunya elemen komunikasi yang mengirim pesan atau pengirim.

Penerima pesan atau komunikan digambarkan tidak memberikan feedback atau umpan balik serta tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan.

2. Peranan Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan bangunan (IMB) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Seperti yang telah diketahui, penulis menetapkan teori Dozier & Broom sebagai acuan dalam penelitian ini. Konsep Dozier & Broom dalam Ruslan (2007:20) menyatakan humas memiliki empat peranan, yaitu sebagai penasehat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process facilitator*), dan teknisi komunikasi (*communication technician*).

a. Peranan Humas Sebagai Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)

Menurut teori ini, seorang praktisi atau pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungandengan publiknya (*public relationship*). Hubungan praktisi pakar humas dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara petugas dengan masyarakat. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari 82 pakar humas tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan humas yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan

b. Peranan Humas Sebagai Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Terdapat beberapa indikator yang akan digunakan untuk mengukur dimensi ini yaitu Komunikator dan menyediakan alat informasi. Humas Pemerintah Dinas Penataan Ruang Koata Makassar telah menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kegiatan setiap bidang di kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Humas. Humas Pemerintah Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam memberikan informasi kepada masyarakat apabila masyarakat belum jelas mengenai informasi yang diberikan, masyarakat bisa menggali infomasi menganai apa saja layanan yang di berikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melalui situs website PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi).

c. Peranan Humas Sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan persoalan kehumasan ini merupakan bagian dari tim Subbagian umum dan kepegawaian. Jadi, praktisi humas berperan membantu pihak Dinas Penataan Ruang Kota Makssar sebagai pemecah masalah dalam mengatasi pengaduan terhadap pembangunan ilegal dan masalah yang terjadi ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam prakteknya humas berkolaborasi dengan unit lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap praktisi humas Dinas Penatan Ruang Kota Makassar.

Praktisi humas Dinas Penataan ruang Kota Makasar juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani pengaduan atau komplain yang datang dari masyarakat. Praktisi humas menjalankan perannya sebagai fasilitator pemecah masalah dengan menjadi garda baris depan dalam penanganan masalah di kantor .

Dalam praktiknya di lapangan, penanganan kasus atau masalah yang terkait kehumasan secara langsung adalah Subbagian umum dan kepegawaian, sekretaris selaku ketua PPID, bidang yang terkait dalam masalah dan beberapa staf humas.

d. Peranan Humas Sebagai Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Bagi praktisi humas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, peran ini diartikan sebagai bentuk implementasi dari program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang direncanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Peranan *communication technician* ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan *method of communication in organization*. Humas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berperan dalam proses pengelolaan informasi dengan melalui tahap peliputan kegiatan internal melakukan pendokumentasian lalu mengumpulkan data untuk dijadikan sebuah press release, kemudian press release diubah menjadi berita yang kemudian di input dan di upload kedalam website PPID.

KESIMPULAN

1. Tata Kelola Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berada di bawah SubBagian umum dan kepegawaian yang berkoordinasi dengan bidang sekretaris dengan beranggotakan 2 orang dengan tugas mengontrol dan mengawasi kegiatan di setiap bidang-bidang, semua anggota harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan menggunakan situs website PPID bertugas untuk merespons permintaan informasi dari masyarakat. Ini memungkinkan Humas untuk fokus pada menjawab pertanyaan dan kebutuhan informasi yang lebih spesifik dari masyarakat terkait program IMB, sehingga memperkuat hubungan antara dinas dan masyarakat.
2. Peranan Humas Sebagai Penunjang Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Peranan Humas sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Humas menjadi juru bicara paling awal ketika masyarakat ingin mengajukan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ketika ada masalah pengaduan pembangunan ilegal yang di keluhkan oleh masyarakat. Selain Menginformasikan, humas juga sebagai filter awal ketika terjadinya masalah atau keluhan terkait pelayanan yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar salah satunya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Yang dimana melalui ketua PPID yang telah menganalisis masalah apa yang terjadi dan setelah masalah terpecahkan langsung di konsultasikan terkait bidang yang bersangkutan yaitu bidang Subbagian Penertiban Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cutlip, Scott M. dkk. 2007. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada
- Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom. Glen. M. 2009, *Effective Public Relations*, Ed. 9. Jakarta :Kencana.
- Jefkins, Frank & Daniel Yadin. 2003. *Public Relations*. Jakarta: Erlangga
- Kasmirus, W. (2013) *Peran Kehumasan dalam Membangun Citra Pemerintah di Kabupaten KutaiBarat*.
- Kriyanto, R. 2017. *teori public realtions perspektif barat dan lokal : aplikasi penelitian dan*

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI
Vol.5 No.1 2024

<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

praktik. jakarta, indonesia: kencana Media Group.

- Otis Baskin. 2016. *Public Relations Profesi Dan Prakti*. Penerbit Salemba Humanika
- Pohan, Z. 2018. *Peran Humas Public Relations Pada Bidang Pendidikan*. Jurnal Sintesa. 18 (1), 103-110.
- Purwanto, N.A. 2020. *Administrasi pendidikan (teori dan praktik di lembaga pendidikan)*. Yogyakarta: Intishar Publishing.
- Rachmadi, F. 1994. *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, R. 2013. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. (Edisi Cetakan Ke 6 Ed.). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosadi. 2016. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunnikasi Konsep dan Aplikasinya* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta : Raja GrafindoPersada.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.339.

Sumber Jurnal

- Darsana, I. G. A. K., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. 2021. *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1). Hal. 62- 67.
- Diani, Mediah, and Sri Ati Suwanto. 2018. "Analisis Sistem Penyimpanan Dalam Temu Kembali Arsip Inaktif Izin Mendirikan Bangunan Titipan Organisasi Perangkat Daerah Di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7(2). Hal. 221-230.
- Hartati, Widi. 2013. "Peranan Humas Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengkampanyekan Program Kaltim Green." *Jurnal Komunikasi* 1(3). Hal 08-20.
- Novianti, Dwita Aida., Reta Mahriani, dan R. A. Wulantari. 2020. "Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Kantor Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017)." *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 4.(2). Hal. 30-39.

Sumber Lain

- Badan Operasi bersama 2007. PT. BSP-Pertamina hulu, CPP Block, *Central Sumatera Basin(BOBCPP)*, Beranda, Ujung tombak. <http://www.bopcpp.co.id/bobd>. (Diakses 20 Oktober 2023).
- Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu Perencanaan Program Kerja Humas Public Relations <http://www.himikomunib.org/2015/12/perencanaan-program-kerja-humas-Public.html>. (Diakses 15 November 2023).
- Larasari, Azizah Fanny. Mengupas IMB: Pengertian, Syarat, dan Manfaat Izin Mendirikan Bangunan. <https://www.rukita.co/stories/imb-izin-mendirikan-bangunan/>. (Diakses 22 November 2023).
- Nadila Rika. Peran Penting Media dalam Kehumasan <https://retizen.republika.co.id/posts/14605/peran-penting-media-dalam-kehumasan>. (Diakses 17 November 2023).
- Pengertian Media Humas (PR Media), Manfaat, Konsep Media dan Tujuan Media Humas (pustakamadani.com).
- RT katalisnet. Media Humas Internal dan Eksternal <https://katalisnet.com/media-humas-internal-dan-eksternal/>. (Diakses 15 November 2023).